

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah pengumpulan, kategorisasi, pemeriksaan serta pembuatan laporan keuangan bagi entitas publik. Lembaga-lembaga publik dapat memanfaatkan laporan ini untuk memberikan data pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak terkait, sehingga membantu dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik digunakan untuk memberikan keterbukaan dan menjunjung tinggi hak-hak publik. Sangat penting bagi sektor publik untuk mematuhi jenis akuntansi ini. Sektor publik terdiri dari banyak entitas seperti lembaga pemerintah regional dan lokal, organisasi non-pemerintah, perusahaan milik negara, lembaga pendidikan dan rumah sakit (Hantono, 2021).

Instansi pemerintah memerlukan dana dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) untuk melakukan kegiatan pelayanan tersebut. Penerimaan bukan pajak (dari sumber daya alam, keuntungan BUMN bagian pemerintah, dan lain-lain) serta penerimaan hibah berasal dari penerimaan pajak (pajak perdagangan dalam dan luar negeri). Pendapatannya berasal dari masyarakat, sehingga pemerintah harus mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan komponen kunci dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di sektor pemerintahan. Fokus akuntansi sektor publik pada negara dan pemerintah pusat merupakan dampak dari terbentuknya pemerintahan negara Indonesia. Kekuasaan mengatur pengelolaan keuangan negara merupakan landasan mendasar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penerapan prinsip ini dinilai akan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan negara, karena pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan APBN dan APBD setiap tahunnya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan (Hasanah & Fauzi, 2017).

APBD menjadi landasan bagi seluruh tindakan pengendalian keuangan di tingkat daerah sepanjang tahun anggaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pemantauan. Keadaan ini searah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah bisa diartikan prosedur yang kompleks dan komprehensif yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dana daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan kerangka kerja yang mengatur tata kelola keuangan daerah, mulai dari perolehan pendapatan hingga akuntabilitas penggunaannya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dengan menggunakan dana APBD untuk mengelola keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilangsungkan secara terorganisir, efisien, ekonomis, terbuka serta tak tergoyahkan. Prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh oleh pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal agar tercapai pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan (Noviyanti & Gamaputra, 2020). *Output* akuntansi berupa pemanfaatan laporan keuangan oleh manajemen dalam menginformasikan keputusan yang diambil serta operasi suatu entitas. *Output* akuntansi menyampaikan data kepada *stakeholder* untuk menilai kinerja keuangan serta keadaan organisasi tersebut (Amani, 2021).

## 2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### a. Pengertian Kinerja

Dalam kamus akuntansi manajemen, kinerja atau *performance* adalah pelaksanaan dari tugas-tugas yang dilakukan oleh suatu entitas dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan komponen dari parameter evaluasi kesuksesan dalam pelaksanaan pekerjaannya (Susanto, 2019). Dalam bahasa Indonesia 'kinerja' adalah frasa dasar yang artinya prestasi. Dalam konteks tugas, kata kinerja identik dengan prestasi. Dalam

konteks organisasi, definisi kinerja adalah hasil atas apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak. Tolak ukur kesuksesan yang telah ditetapkan adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kinerja seseorang atau sekelompok orang. Tolak ukur keberhasilan di sini selaras dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan. Apabila tanpa standar yang jelas, penilaian kinerja menjadi subjektif dan tidak terukur secara objektif (Andirfa, 2018). Kinerja dapat didefinisikan sebagai gabungan antara aktivitas yang dilakukan dan cara penyelesaiannya. Hal ini mengarah pada pencapaian hasil yang konsisten dengan tujuan strategi organisasi, meningkatkan persepsi pelanggan, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian (Dila Wandasari & Aqwa Naser Daulay, 2023).

Menurut (Rivai, 2020), kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian yang diraih oleh seorang individu dalam kurun waktu tertentu, yang dievaluasi berdasarkan berbagai indikator seperti ukuran, target, atau kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Penelitian lain menyatakan bahwa kerja terdefinisi sebagai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang individu agar mencapai hasil yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan kuantitas, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam segala kegiatan yang dapat menunjang pertumbuhan organisasi (Sihaloho & Siregar, 2019). Kinerja menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu entitas. Untuk memanfaatkannya, seseorang harus memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memperbaiki diri mereka untuk dievaluasi di masa mendatang (Soemitra et al., 2023). Sumber daya manusia adalah komponen yang paling penting untuk mencapai kinerja yang baik. Perencanaan yang baik akan sia-sia jika pekerja tidak berkualitas dan tidak bersemangat (Muis et al., 2018).

Berdasarkan dari definisi-definisi yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sebuah tim dalam suatu entitas dalam menyelesaikan

tugas yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan peran mereka. Kinerja yang baik dapat diukur dengan beberapa indikator.

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja**

Menurut (Sihaloho & Siregar, 2019), ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja, antara lain:

- 1) Faktor internal karyawan dapat didefinisikan sebagai karakteristik dan kemampuan bawaan yang dimiliki individu, serta kualitas yang mereka peroleh dan kembangkan selama perjalanan hidup mereka. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan kinerja dan kontribusi karyawan terhadap organisasi.
- 2) Lingkungan internal organisasi mengacu pada faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi dan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Faktor-faktor ini menciptakan atmosfer dan kondisi kerja yang memengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan.
- 3) Lingkungan eksternal organisasi mempengaruhi keadaan, peristiwa, atau keadaan di luar organisasi yang mungkin mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja karyawan dan operasi organisasi secara keseluruhan. Faktor-faktor ini terbagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama masyarakat serta kompetitor.

#### **c. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah berarti efektivitas dan kecakapan suatu wilayah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya keuangan asli daerahnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Seharusnya dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi manfaat bagi masyarakat daerah karena mereka tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah

pusat (Dali et al., 2021). Keberhasilan kinerja keuangan sangat bergantung pada seberapa baik suatu organisasi dalam mengelola keuangan atau dananya (Siagian et al., 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) mengacu pada kemampuan dan efektivitas mereka dalam mengelola keuangan daerahnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemda selama periode anggaran tertentu dengan menggunakan indikator keuangan yang dikeluarkan oleh peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Kinerja ini diwakili oleh rasio keuangan yang terdiri dari elemen-elemen dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang terdiri dari perhitungan APBD (Nurarifah et al., 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) dapat diartikan sebagai kecakapan dan efektivitas pemda dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan oleh berbagai indikator mata uang yang telah dimasukkan dalam peraturan yang mengatur perubahan suku bunga dalam jangka waktu tertentu. Tujuan analisis rasio dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk mengidentifikasi tren dengan membandingkan hasil periode satu dengan periode sebelumnya (Susanto, 2019). Analisis ini juga bisa dilaksanakan dengan membandingkan target nilai tukar yang ditetapkan pemerintah daerah dengan potensi di tempat lain yang sebanding. Membandingkan rasio keuangan antar pemerintah daerah akan menunjukkan seberapa baik rasio tersebut. Keberhasilan kinerja keuangan sangat bergantung pada seberapa baik suatu organisasi dalam mengelola keuangan atau dananya.

#### **d. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik**

Salah satu alat penting dalam pencapaian keseimbangan kehidupan kerja yang baik adalah pengukuran kinerja. Agar menjangkau keseimbangan kehidupan kerja yang optimal, seseorang harus memiliki

tujuan yang jelas dan melakukan pengukuran ini secara teratur. Hal ini akan memberikan umpan balik yang akan membantu dalam melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan suatu entitas untuk masa depan (Novitasari, 2021).

Menurut (Deswira, 2022), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan antara lain:

- 1) Mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasi otonomi daerahnya sendiri.
- 2) Mengevaluasi seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan.
- 3) Mengevaluasi sejauh mana aktivitas pemerintah daerah membelanjakan pendapatannya.

Menurut (Mahmudi, 2015), penilaian kinerja di sektor publik mempunyai tujuan antara lain:

- 1) Menilai kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis yang sudah dipatokkan.
- 2) Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar.
- 3) Menjaga integritas kerja untuk jangka waktu berikutnya.
- 4) Menerapkan pendekatan sistematis dalam proses perumusan pendapat tentang kompensasi dan hukuman.
- 5) Meningkatkan motivasi pegawai.
- 6) Berpartisipasi dalam akuntabilitas publik.

#### **e. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Menurut (Mardiasmo, 2018), manfaat dari pengukuran kinerja sektor publik adalah:

- 1) Menyampaikan interpretasi tentang indikator yang dipakai dalam mengevaluasi kinerja manajemen.
- 2) Menyampaikan arahan tentang cara memperoleh sasaran kinerja.

- 3) Mencatat dan menilai pencapaian kinerja, mencocokkannya dengan sasaran kinerja, serta mengambil perbuatan koreksi untuk menaikkan kinerja.
- 4) Berfungsi menjadi landasan untuk apresiasi dan putusan yang adil didasarkan kemampuan yang diukur menggunakan sistem pengukuran kinerja yang sudah disetujui.
- 5) Memfasilitasi memorandum antara pimpinan dengan bawahan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.
- 6) Memfasilitasi dalam menentukan apakah keinginan konsumen sudah terwujud.
- 7) Memberikan pemahaman tentang bagaimana operasi pemerintahan dijalankan.
- 8) Menjamin prosedur pengambilan keputusan dilaksanakan secara adil.

#### **f. Indikator-Indikator Pengukuran Kinerja Sektor Publik**

Menurut (Mahsun, 2012), ada beberapa indikator pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

##### 1) Indikator *Input* (Masukan)

Indikator masukan ialah semua yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan dengan benar dan menghasilkan keluaran. Contohnya, berapa banyak dana yang dibutuhkan, berapa banyak staf dan infrastruktur yang tersedia, serta berapa banyak penggunaan durasinya.

##### 2) Indikator *Process* (Proses)

Indikator proses ialah memformulasikan serta menunjukkan parameter pekerjaan seperti kecepatan produksi, ketepatan waktu, dan akurasi pelaksanaan. Contohnya, ketaatan pada undang-undang dan peraturan yang dibutuhkan untuk memproses atau membuat layanan barang serta jasa.

### 3) Indikator *Output* (Keluaran)

Indikator keluaran yaitu parameter yang dimanfaatkan untuk pengukuran dan pengevaluasian hasil ataupun *output* yang didapatkan dari suatu proses atau aktivitas. Indikator ini berorientasi pada produk atau jasa yang dihasilkan, serta tidak terkait dengan proses yang digunakan untuk menghasilkannya.

### 4) Indikator Hasil (*Outcome*).

Indikator hasil yaitu standar yang dipakai untuk menilai serta pengevaluasian dampak jangka menengah dari suatu kegiatan atau program. Indikator ini berfokus pada manfaat atau nilai tambah yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau program, dan bukan pada proses atau keluaran.

### 5) Indikator Manfaat (*Benefit*).

Indikator manfaat ialah berkaitan dengan manfaat terhadap tujuan akhir kegiatan, seperti tingkat partisipasi penduduk serta tingkat kepuasannya.

### 6) Indikator Dampak (*Impact*).

Indikator dampak ialah perubahan positif atau negatif yang terjadi secara langsung atau tidak langsung, seperti peningkatan rasa kebersamaan dan pendapatan penduduk.

## **g. Kinerja dalam Pandangan Islam**

Kinerja adalah tingkat keberhasilan yang dicapai seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam ekonomi Islam, hasil kerja atau status pekerjaan seseorang ditentukan oleh seberapa baik mereka melakukan suatu tugas dalam kaitannya dengan norma tertentu. Allah mengungkapkan peran *humanoid* di forma siksa dan pahala. Allah akan melimpahkan keberkahan kepada orang-orang yang menaati seluruh perintah-Nya; di sisi lain, mereka yang menolak aturan-Nya akan menghadapi hukuman yang berat dan mengerikan. Dalam Islam, Allah pasti akan menilai semua tindakan manusia. Allah

akan menghitung semua usaha dan amal umatnya. Bagi mereka yang berusaha dengan keras, Allah akan memberikan nasib baik. Hasil yang diberikan kepada seseorang adalah hasil dari upaya tulus mereka untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Hal ini bukan hanya hasil dari doa yang tulus, tetapi juga hasil dari kerja keras dan kesucian akidah. Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan Islam dalam menilai kinerja seseorang dalam pekerjaan mereka, antara lain niat untuk bekerja karena Allah; menerapkan kaidah/standar/syariah secara kaffah dalam pekerjaannya; motivasi bekerja untuk tujuan spiritual memperoleh kekayaan dunia dan akhirat; menerapkan prinsip efisiensi dan kekayaan dengan konsisten mengejar kebutuhan hidup; menyelesaikan konflik antara beribadah dan menemukan harta; menunjukkan rasa hormat kepada Allah dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah; membantu orang miskin dan yatim (Mahfud, 2019).

Kaitannya dengan kinerja dan penilaian kinerja pada pemikiran Islam, bisa diperhatikan pada surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah : 105).*

Tafsir Al-Mishbah menggarisbawahi kewajiban manusia untuk melaksanakan amal saleh, baik secara individual maupun kelompok. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa meskipun taubat telah diterima, waktu yang terbuang sia-sia dalam melakukan perbuatan dosa tidak dapat dikembalikan. Dengan kata lain, manusia telah mengalami kerugian

moral dan spiritual yang tak tergantikan akibat terlena dalam keburukan. Oleh karena itu, tafsir Al-Mishbah mendorong umat manusia untuk giat beramal saleh sebagai upaya meminimalisir kerugian di akhirat kelak (Shihab, 2005).

Selain itu, balasan dari kinerja dalam Islam terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٩)

Artinya:

*Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan (QS. Al-Ahqaf : 19).*

Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa meskipun semua makhluk, termasuk manusia, terdiri dari orang-orang yang menderita dan orang-orang yang beriman, setiap individu memiliki kedudukan dan tingkatan tersendiri di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Kedudukan ini ditentukan berdasarkan amal perbuatan mereka, baik tinggi atau rendahnya. Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka yaitu memberi balasan kepada yang baik karena kebajikannya dan kepada yang buruk karena keburukannya. Tidak akan ada ketidakadilan dari Allah dalam memberi pahala atau hukuman yang seharusnya. Allah tidak akan menzalimi mereka sebesar zarah pun atau bahkan lebih kecil dari itu (Az-Zuhaili, 2018).

Balasan kinerja dalam Islam dapat dilihat juga dalam surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

*Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya*

*kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl : 97).*

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, sesuai dengan apa yang difirmankan didalam Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW, Allah SWT mengaruniai manusia kehidupan yang baik di bumi dan kehidupan yang bertambah baik di *yaumul mahsyar*, sehingga pada akhirnya dapat melakukan mukjizat. Jiwa yang terlepas dari bentuk dan wujudnya bisa memberi kesenangan sebagai petunjuk (Al-Sheikh, 2003).

Adapun mengenai pertanggungjawaban dalam melakukan kinerja terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya (QS. Al-Isra' : 36).*

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa Allah mempunyai kewajiban untuk mengakui setiap makhluk-Nya dan menebus segala dosanya. Seruan ini ditegaskan dengan larangan mengikuti hal-hal yang tidak diketahui maknanya. Umat Islam diwajibkan untuk tidak berucap, mengaku mengetahui, atau mengaku mendengar sesuatu yang tidak benar-benar mereka ketahui. Hal ini dikarenakan pendengaran, penglihatan, dan hati adalah instrumen pengetahuan yang akan dipertanggungjawabkan atas penggunaannya di hadapan Allah SWT (Shihab, 2005).

### **3. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah mensosialisasikan keuangan daerah kepada para pemerintah dan publik dengan cara pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, salah satu metode yang amat krusial untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan

menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang sudah selesai dan dikerjakan (Halim & Kusufi, 2012).

Pemerintah dapat menilai sejauh mana keterlibatannya dalam pendanaan pengelolaan otonomi daerah melalui penerapan analisis rasio keuangan. Studi ini memungkinkan untuk mengevaluasi seberapa baik kontribusi manajemen perubahan terhadap rasio aktivitas terhadap peristiwa dan untuk menerapkan manajemen perubahan yang memiliki keefektifan dan keefisienan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan pendapatan (Fadli et al., 2023).

Proses membandingkan hasil suatu periode pertukaran dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan dan variasi yang terjadi saat ini disebut analisis rasio keuangan terhadap APBD. Keterlibatan terhadap keuangan pemerintah daerah dimiliki oleh beberapa pihak, diantaranya: (Halim & Kusufi, 2012)

- a. DPRD.
- b. Pihak manajerial sebagai dasar untuk penyusunan APBD berikutnya.
- c. Pemerintah pusat dan provinsi memanfaatkan informasi untuk meningkatkan implementasi pengelolaan keuangan daerah.
- d. Masyarakat dan kreditur, yang sanggup meminjamkan atau membeli surat pinjaman guna mendapatkan saham dalam pemerintah daerah.

Berikut adalah macam-macam rasio keuangan yang dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengukur kinerja keuangan mereka, diantaranya:

#### **a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal diungkapkan oleh rasio (tanggung jawab dan otoritas) yang dikirim oleh pemerintah pusat kepada pemda dalam mengelola keuangan dan mendukung proyek-proyek pembangunan di daerah (Siregar & Mariana, 2020). Membandingkan jumlah PAD dengan total pendapatan daerah merupakan salah satu cara untuk memahami rasio derajat keuangan desentralisasi. Kemampuan daerah dalam

melaksanakan desentralisasi semakin meningkat seiring dengan peningkatan keterlibatan PAD (Mahmudi, 2011). Perhitungan rasio ini bisa ditentukan memakai rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Ambya (2023: 202)

#### b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kesanggupan penda dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, membangun serta melayani publik secara mandiri, terutama dengan memanfaatkan pendapatan yang bersumber dari pajak serta retribusi daerah. Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang meliputi bantuan dari pihak eksternal (Halim & Kusufi, 2012). Perhitungan rasio ini dapat ditentukan dengan rumus:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan level ketergantungan daerah terhadap sumber keuangan eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah pada sumber keuangan luar dan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini memperlihatkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan melalui kontribusi pajak serta retribusi daerah meningkat. Dengan demikian,

rasio ini membantu dalam memantau tingkat ketergantungan daerah dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sendiri (Halim & Kusufi, 2012).

**Tabel 2.2 Pola Hubungan dengan Kemampuan Keuangan**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Sangat rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

*Sumber: Abdul Halim (2007: 169)*

Keterangan pola hubungan rasio kemandirian keuangan daerah:

- 1) Pola hubungan instruktif dalam otonomi daerah mengacu pada skema di mana pemerintah pusat memegang kendali yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah.
- 2) Pola hubungan konsultatif dalam otonomi daerah menunjukkan pergeseran peran pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah semakin mandiri dan mampu mengelola otonominya.
- 3) Pola hubungan partisipatif dalam otonomi daerah menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dari pemerintah pusat serta daerah dalam mengelola otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegasi dalam otonomi daerah menunjukkan peralihan otoritas yang penuh melalui pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola otonominya.

### **c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Salah satu metrik terpenting untuk menilai tingkat stabilitas keuangan di suatu lokasi adalah rasio ketergantungan daerah. Perhitungan statistik ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan transfer yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2011). Rumus perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah**

Ketergantungan	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Tinggi
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Ambya (2023: 202)

#### d. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD ialah sebuah metrik penting untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah pusat menjalankan tugasnya dalam mencapai tujuan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD yang dapat dicapai dibandingkan dengan PAD yang diharapkan sebelumnya (Halim & Kusufi, 2012). Perhitungan rasio tersebut ditetapkan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4 Kriteria Rasio Efektivitas**

Efektivitas (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2011: 171)

#### e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan sebenarnya yang diperoleh. Jika rasionya kurang dari 1 atau 100%, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan pendapatan dianggap efisien. Semakin kecil rasionya, maka semakin baik kinerjanya. Oleh karena itu,

untuk menentukan efisiensi upaya pengumpulan pendapatan, pemerintah daerah harus secara tepat menghitung biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan mereka peroleh (Halim & Kusufi, 2012). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Keterangan</b>
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

*Sumber: Abdul Halim (2007: 234)*

#### **f. Rasio Keserasian**

Rasio keserasian menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengalokasikan dana terhadap belanja operasi serta belanja modal. Apabila persentase dana yang dianggarkan akan belanja operasi meningkat, maka dana yang dianggarkan akan belanja modal, seperti infrastruktur, cenderung menurun. Dengan demikian, rasio keserasian membantu dalam memantau bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya ekonomi dan memprioritaskan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Halim & Kusufi, 2012).

Rasio keserasian adalah rasio yang membahas belanja operasi serta belanja modal. Rasio belanja operasi ialah ukuran yang membandingkan keseluruhan jumlah dana yang dikeluarkan untuk belanja operasional dengan total belanja daerah. Ini adalah hubungan yang dimaksudkan untuk memberi tahu semua pemakai atau pihak yang mempunyai kepentingan mengenai laporan alokasi belanja daerah untuk pembiayaan operasional. Belanja operasi dapat dirasakan manfaatnya selama satu tahun periode sehingga bersifat jangka pendek yang berjalan secara

konsisten dan berkelanjutan. Rasio belanja ialah ukuran yang membandingkan keseluruhan jumlah dana yang dikeluarkan untuk belanja modal dengan total belanja daerah. Dengan memanfaatkan rasio ini, pengguna laporan dapat dengan mudah melihat proporsi pendanaan daerah yang diperuntukkan bagi investasi belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan (Farida & Nugraha, 2019).

Belum terdapat patokan universal mengenai rasio optimal antara belanja operasi dengan belanja modal dalam kaitannya dengan APBD. Keadaan ini disebabkan oleh banyaknya investasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pertumbuhan yang diinginkan dan dinamisasi kegiatan pembangunan. Namun, dalam konteks negara berkembang, pemerintah daerah tetap memainkan peran penting dalam inisiatif pembangunan daerah. Maka dari itu, rasio belanja modal yang saat ini masih cukup rendah perlu dimaksimalkan seiring dengan kemajuan pembangunan daerah (Halim & Kusufi, 2012). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### **g. Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan mewakili sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya di setiap periodenya. Dengan memahami pola pertumbuhan pendapatan serta pengeluaran, pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan mana dari peluang-peluang yang harus dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, rasio pertumbuhan membantu dalam memantau kesanggupan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta pertahanannya terhadap kinerja keuangan yang stabil dan berkembang (Halim & Kusufi, 2012). Rasio pertumbuhan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi apakah kinerja anggaran menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja yang signifikan secara positif atau negatif selama tahun anggaran. Dengan demikian, rasio pertumbuhan

membantu dalam memantau kinerja keuangan pemerintah daerah dan menentukan apakah anggaran telah mencapai tujuan yang ditetapkan (Mahmudi, 2010). Perhitungan rasio ini dapat ditentukan dengan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

r = Rasio Pertumbuhan

$P_n$  = PAD/Total Pendapatan Daerah/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = PAD/Total Pendapatan Daerah/Belanja Operasi/Belanja Modal yang dihitung pada tahun sebelum n.

#### 4. Laporan Keuangan Pemerintah

##### a. Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

##### 1) Laporan Realisasi Anggaran

Sebagai catatan transaksi keuangan yang dikelola oleh pemerintah federal atau suatu daerah, dokumen Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan kesesuaian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LRA memberikan ringkasan tentang sumber daya, alokasi dan pemanfaatan perekonomian oleh pemerintah selama periode tertentu. LRA menunjukkan data realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang semuanya dibandingkan dengan perencanaannya pada waktu yang bersangkutan. Dengan demikian, LRA membantu dalam memantau dan mengawasi kinerja keuangan pemerintah serta memantau konsistensi terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, LRA juga memaparkan daftar rinci angka-angka yang dianggap penting untuk dipaparkan dalam CALK, seperti pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan. Hal ini

membantu menjaga stabilitas keuangan pemerintah dan Anggaran yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, LRA membantu menjaga dan memantau kinerja keuangan mata uang pemerintah serta menjaga konsistensi terhadap batasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan dokumen keuangan yang menyajikan analisis komparatif mengenai perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara periode pelaporan saat ini dengan periode sebelumnya. LPSAL memuat informasi rinci terkait komponen-komponen penyusun SAL, dinamika penggunaannya, dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahannya. Salah satu unsur penting lainnya adalah saldo anggaran lebih akhir menampilkan perbandingan dengan periode sebelumnya, menjelaskan perbedaan antara periode saat ini dan periode sebelumnya, serta memberikan rincian dan penjelasan tentang hal-hal penting yang relevan. Dengan demikian, laporan ini membantu dalam memahami perubahan dan perkembangan anggaran lebih secara lebih jelas dan akurat.

#### 3) Neraca

Neraca bagaikan potret keuangan entitas pada tanggal tertentu, memberikan gambaran kondisi keuangan entitas pada momen tersebut. Laporan ini menjadi elemen penting terletak pada potensinya untuk memberikan pemahaman kepada konsumen tentang aset, likuiditas, dan modal secara keseluruhan. Neraca membandingkan posisi yang sebanding dengan kuartal sebelumnya, termasuk kas, persediaan, investasi jangka pendek dan panjang, aset berwujud, utang jangka pendek dan panjang, serta ekuitas.

#### 4) Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan elemen penting dalam laporan keuangan entitas pelaporan. Laporan ini menyajikan ikhtisar komprehensif tentang aktivitas operasional entitas selama periode

akuntansi tertentu, membantu pengguna laporan memahami kinerja keuangan dan profitabilitas entitas. laporan yang dihasilkan dari siklus akuntansi berbasis akrual, yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca saling terkait dan berkesinambungan. Hubungan ini penting untuk mempertahankan akuntabilitas dan menyediakan gambaran menyeluruh tentang posisi dan kinerja keuangan entitas.

Laporan operasional meskipun memberikan gambaran ringkas tentang kinerja keuangan entitas, mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk interpretasi yang komprehensif. Di sinilah Catatan atas Laporan Keuangan berperan penting.

#### 5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memperlihatkan dari mana dana pemerintah berasal, bagaimana uang digunakan, dan berapa sisa uang di akhir periode. Laporan ini juga menunjukkan saldo kas dan setara atas bulan tertentu. Laporan ini adalah alat penting untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja pemerintah. Laporan arus kas membagikan penjelasan yang berharga kepada pemakai untuk membuat keputusan yang tepat tentang pemerintah. Laporan arus kas pemerintah mengelompokkan arus kas berlandaskan empat kategori utama yaitu kegiatan operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Pengelompokan ini membantu pengguna laporan memahami bagaimana aktivitas-aktivitas pemerintah memengaruhi saldo kas dan setara kasnya.

Aktivitas operasi dalam laporan arus kas pemerintah mengacu pada arus kas yang dihasilkan dari kegiatan utama dan inti pemerintah selama periode akuntansi tertentu. Kegiatan ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan dan fungsi fundamental pemerintah dalam melayani masyarakat. Aktivitas investasi dalam laporan arus kas pemerintah mengacu pada arus kas yang dihasilkan dari akuisisi serta penyerahan aset jangka panjang

dan investasi lainnya yang bukan dikategorikan sebagai setara kas selama periode akuntansi tertentu. Aktivitas ini mencerminkan strategi investasi pemerintah. Aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas pemerintah mengacu pada arus kas yang terkait dengan perolehan dan penggunaan dana untuk membiayai operasinya dan investasinya selama periode akuntansi tertentu. Aktivitas ini mencerminkan strategi pendanaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Aktivitas transitoris dalam laporan arus kas pemerintah mengacu pada arus masuk dan keluar kas yang tidak meliputi kegiatan operasi, investasi serta pendanaan (Mahmudi, 2011).

#### 6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas bagaikan jendela yang memungkinkan kita melihat evolusi ekuitas suatu entitas selama periode akuntansi. Pada laporan ini menyediakan informasi penting tentang transformasi yang terjadi pada ekuitas dari satu tahun ke tahun sebelumnya, memberikan gambaran menyeluruh tentang sumber dan penggunaan modal entitas.

#### 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan dokumen pelengkap laporan keuangan yang menyampaikan informasi rinci dan komprehensif terkait berbagai angka dalam laporan keuangan entitas pelaporan. Tujuan utama CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyajian informasi keuangan, serta membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kondisi keuangan entitas pelaporan secara lebih mendalam. CaLK memberikan informasi berikut:

- a) Menyajikan informasi mengenai identitas, sifat kegiatan, dan struktur kepemilikan entitas pelaporan.

- b) Menjelaskan kebijakan fiskal dan keuangan serta memberikan gambaran tentang kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja entitas pelaporan.
- c) Ringkasan tujuan keuangan yang telah dicapai sepanjang tahun pelaporan beserta keterbatasan dan tantangan yang dihadapi.
- d) Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan mengidentifikasi peraturan akuntansi yang diimplementasikan pada transaksi dan kejadian signifikan lainnya.
- e) Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami makna dan implikasi dari setiap pos.
- f) Menjelaskan informasi yang wajib disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Publik (PSAP) yang tidak dicantumkan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Informasi tambahan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar, yang tidak dicantumkan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut (Haryanto & Arifuddin, 2018), tujuan dari laporan keuangan pemerintah yaitu:

- 1) Penyajian informasi terkait perolehan, pendistribusian, dan penggunaan sumber daya keuangan difungsikan untuk memahami siklus pengelolaan dana organisasi dalam mencapai tujuannya.
- 2) Penyajian informasi terkait proporsi penerimaan periode berjalan yang diperlukan untuk menutupi seluruh biaya difungsikan untuk mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajibannya.

- 3) Penyajian informasi terkait penempatan sumber daya ekonomi pada aktivitas perusahaan dan pencapaian yang dihasilkan difungsikan untuk mengevaluasi keefisienan dan keefektifan pemanfaatan sumber daya.
- 4) Penyajian informasi terkait asal-usul dana dan strategi pengelolaan keuangan yang diterapkan perusahaan difungsikan untuk memahami struktur pendanaan dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam mendukung aktivitas operasional dan memenuhi kewajiban keuangan.
- 5) Penyajian informasi terkait situasi keuangan perusahaan dalam kaitannya dengan pendapatan, yang mencakup penilaian risiko keuangan dan operasional usaha, seperti kebutuhan pajak dan pinjaman, berfungsi untuk menilai kesehatan perusahaan dan kemajuannya.
- 6) Penyajian informasi terkait tren kondisi keuangan perusahaan sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan difungsikan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

### **c. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut (Fitra, 2019), ada beberapa manfaat dari penyajian laporan keuangan pemerintah antara lain:

- 1) Penyediaan informasi keuangan difungsikan untuk melakukan evaluasi dan estimasi kondisi keuangan pemerintah, dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam memenuhi utang jangka pendek dan panjang.
- 2) Penyediaan informasi keuangan difungsikan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi serta transformasi ekonomi pemerintah.
- 3) Penyediaan informasi keuangan difungsikan untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, kontrak, dan ketentuan lainnya.

- 4) Penyajian informasi terkait penganggaran dan perencanaan difungsikan untuk mendukung pemahaman mengenai proses alokasi sumber daya keuangan secara sistematis dan terstruktur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Penyediaan informasi difungsikan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen dan organisasi.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang berkenaan dengan judul penelitian, diantaranya:

**Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rylies Manages, Yusnita Dwi Wardani, Herlina Pramuwardani, Selvia Dhulhi Rahmawati (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020-2022	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas mencapai 100% dalam hasil diperlihatkan bahwa rasio tersebut sangat efektif pada tahun 2020–2021. Meskipun demikian terjadi penurunan sebesar 87,48% pada tahun 2022. Rasio efisiensi perhitungan untuk tahun 2020-2022 dinilai cukup efisien karena kurang dari 100%.
2	Ida Ayu Ari Mustika (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar Periode	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2018-2019 tergolong baik kemudian tahun 2020-2021 dikategorikan sedang. Tingkat rasio efektivitas PAD tergolong

		2018-2021		sangat tinggi karena lebih dari 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2018 adalah efisien, kurang efisien pada tahun 2019, cukup efisien pada tahun 2020, dan kurang efisien pada tahun 2021.
3	Juliansyah (2022)	Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Aspek Keuangan	Deskriptif Kuantitatif	Temuan studi ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak sekuat yang seharusnya. Analisis rasio kegiatan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kurang baik karena pemerintah lebih banyak mengeluarkan uang untuk proyek rutin dibandingkan proyek modal. Hasil analisis laju pertumbuhan menunjukkan bahwa pemerintah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan PAD, laju pertumbuhan rutin naik dan laju pertumbuhan modal menurun. Berdasarkan indikator perekonomian, pemerintah dapat menekan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2015–2020, namun pada tahun 2016 tingkat ekonomis menurun tajam. Hasil rasio efektivitas

				menunjukkan bahwa pemerintah berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil rasio efisiensi menunjukkan pemerintah sangat efisien.
4	Syaifullah Sofyan (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015-2019	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata 58,8% derajat sangat baik. Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan delegatif sebesar 147,2%. Rata-rata rasio efektivitas PAD cukup efektif sebesar 99,2%. Rasio efisiensi tergolong tidak efisien dengan angka 100,1%. Dibandingkan dengan belanja modal yang rata-ratanya sebesar 10,1%, rasio keserasian dari belanja operasi terbilang lebih tinggi yakni sebesar 57,4%.
5	Erma Julaida Harahap (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah	Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi yaitu 4,74% tergolong sangat kurang. Kemandirian keuangan daerah mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dengan rata-rata sebesar 7,07%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tergolong tidak efektif yaitu sebesar 91,69%. Hasil efisien ke-

		Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015-2019)		uangan regional diklasifikasikan efisien yaitu 94,74%. Jika dibandingkan dengan belanja modal, rasio keserasian hasilnya agak mengutamakan alokasi dan implikasinya terhadap operasional belanja.
6	Dwi Supriati (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	Kuantitatif	Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah Sumber Sari, Kabupaten Kampar, memiliki keterampilan pengelolaan keuangan yang baik dalam hal alokasi dan desa. Desa dinyatakan efektif dengan hasil rasio efektivitas. Meskipun laju pertumbuhan pendapatan berfluktuasi, laju pertumbuhan dana desa meningkat setiap tahunnya.
7	Heri Faisal Harahap (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Deskriptif Kuantitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi masih terbilang sangat rendah. Ketergantungan pemerintah pusat/provinsi masih sangat tinggi. Hasil rasio efektivitas tahun 2016 sudah efektif, sedangkan tahun 2018 dan 2019 menurun di bawah 100% sehingga menjadi tidak efektif.
8	Nizwan Zuhri	Kinerja Keuangan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian tersebut adalah persentase kema-

	(2020)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan dan Desentralisasi Fiskal		dirian Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2016 hingga tahun 2018 terbilang rendah atau tetap dalam hubungan konsultatif. Ketergantungan keuangan berada pada kisaran 61,05%–68,41% termasuk kategori tinggi. Hasil rasio desentralisasi fiskal berada pada rentang 29,47–33,26% yang menunjukkan kategori sedang dan cukup.
9	Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulana Nugraha (2019)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Subang	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini didasarkan pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Subang pada tahun 2014 hingga 2017 dikategorikan rendah sekali berdasarkan frekuensi kemandirian keuangan daerah. Hasil rasio keserasian masih lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Hasil tingkat pertumbuhan dari tahun 2014 hingga 2017 dapat dikatakan masih sangat rendah.
10	Hery Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah	Deskriptif	Hasil penelitian tersebut didasarkan pada rasio efektivitas tahun 2012-2015 yang tergolong efektif berdasarkan persentase melebihi 100% yaitu sebesar 101,85%. Berdasarkan hasil rasio

		Daerah Kota Mataram	<p>efisiensi tahun 2012-2015, kelompok tersebut tergolong kurang efisien dikarenakan persentasenya di bawah 100% atau sebesar 99,12%. Berdasarkan rasio kemandirian tahun 2012-2015 tergolong relatif rendah dengan rata-rata sebesar 17,71%. Berdasarkan hasil rasio aktivitas dari tahun 2012 hingga 2015, kelompok tergolong rendah karena rasio operasional diprioritaskan dengan rata-rata 78,89% dibandingkan laju modal sebesar 21,1%. Berdasarkan rasio pertumbuhan tahun 2012-2015, kelompok tersebut tergolong kurang baik karena terjadi penurunan PAD setiap tahunnya. Meski begitu, pendapatan daerah tergolong sedang. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 14,65% sehingga menyebabkan kenaikan pada tahun 2014 sebesar 25,09% dan penurunan pada tahun 2015 sebesar 9,77%.</p>
--	--	---------------------	---

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, teknik analisis data yang diterapkan. Kajian ini menggunakan tujuh rasio keuangan yang lebih komprehensif, yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio

keserasian, dan rasio pertumbuhan. Kedua, lokasi penelitiannya juga berbeda. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, namun lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di daerah lain.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kinerja keuangan pemerintah daerah berarti gambaran umum dari keadaan keuangan suatu pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mengevaluasi kemampuan keuangan daerahnya adalah dengan mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dinilai dengan menganalisis berbagai rasio keuangan antara lain rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian serta rasio pertumbuhan.

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan daerah mana yang mampu melaksanakan otonomi. Ukuran dalam menilai kemandirian yaitu kemampuan daerah untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar nilai rasio kemandirian maka semakin besar pula tingkat kemandirian daerah dan semakin besar pula rasio ketergantungan terhadap pemerintah provinsi dan pusat. Sebaliknya, rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan adanya kontribusi signifikan pendapatan transfer dalam mempengaruhi pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin besar pula rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi, serta rasio kemandirian tergolong sangat tinggi.

Kesanggupan pemda dalam mencapai tujuan PAD ditunjukkan oleh rasio efektivitas PAD. Rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh. Rasio keserasian mengindikasikan cara pemda mengutamakan alokasi anggaran antara belanja operasi dan belanja modal. Ketika alokasi dana untuk belanja operasi naik, maka anggaran belanja modal yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat menurun, demikian pula sebaliknya.

Penelitian ini turut mengkaji rasio pertumbuhan sebagai indikator kemampuan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melanjutkan pencapaian kinerjanya dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini berguna untuk menentukan apakah kinerja anggaran daerah menunjukkan pertumbuhan positif atau negatif dalam hal pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran. Analisis rasio pertumbuhan ini, bersama dengan rasio keuangan lainnya, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah gambar 2.1 tentang kerangka berpikir:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**